



LTMPT

Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi



PENTINGNYA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SNMPTN DAN UTBK-SBMPTN TAHUN 2022

Jakarta, 29 - 31 Juli 2022

Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT)





JALUR DAN KUOTA

1

Pelaporan Keuangan

SNMPTN

MINIMUM 20%

BERDASARKAN NILAI AKADEMIK SAJA ATAU NILAI AKADEMIK DAN PRESTASI LAINNYA (YANG DITETAPKAN OLEH PTN)

BIAYA DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

2

SBMPTN

MINIMUM 40%

BERDASARKAN HASIL UTBK SAJA ATAU HASIL UTBK DAN KRITERIA LAIN (YANG DITETAPKAN BERSAMA OLEH PTN) PELAKSANAAN TES MENGGUNAKAN KOMPUTER

BIAYA DITANGGUNG OLEH PESERTA DAN SUBSIDI PEMERINTAH

3

JALUR MANDIRI

MAKSIMUM 30%

DAPAT MENGGUNAKAN NILAI UTBK

***PTN Badan Hukum**
SBMPTN Minimum 30% dan Seleksi Mandiri Maksimum 50%

Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan LTMPT 2022

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-539/MK.02/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Standar Biaya Masukan Lainnya pada Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
9. Peraturan Perundangan-undangan lainnya yang relevan.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan LTMPT 2022

Kegiatan yang dilaksanakan dengan penugasan pada Panitia Lokal (PTN anggota LTMPT) adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan Promosi tentang Pelaksanaan SNMPTN–SBMPTN;**
- b. Seleksi Akademik dan Portofolio SNMPTN;**
- c. Pusat Tes UTBK-SBMPTN.**
- d. Pengelolaan swakelola Tipe II dengan PTNBH:**
 1. Pengadaan/Jasa Kesekretariatan, Pengembangan Materi Tes, Penilaian, Pengembangan dan Penilaian Portofolio, *Call Center*, *Helpdesk*, dan *Front Desk*, serta Sosialisasi dan Promosi;
 2. Pengadaan, Implementasi, serta Pengoperasian Teknologi dan Sistem Informasi (TSI);
 3. Pengembangan Sistem SNMPTN;
 4. Pengadaan Pengembangan Sistem UTBK dan Implementasinya pada SBMPTN.

STRUKTUR BELANJA KONTRAK KEGIATAN LTMPT



No.	Jenis Penugasan	Struktur Belanja			
		Honorarium (Maksimum)	Operasional Manajemen (Minimum)	Belanja Barang Operasional (Maksimum)	Penyusunan Laporan (Maksimum)
1	Sosialisasi dan Promosi Kegiatan LTMPT	25%	70%	-	5%
2	Seleksi Akademik dan Portofolio SNMPTN	20%	60%	15%	5%
3	Pelaksanaan UTBK- SBMPTN	30%	50%	15%	5%
4	Swakelola/Penugasan Khusus	Sesuai dengan proporsi dalam kontrak kegiatan			

Perhitungan Alokasi SNMPTN



Biaya Tetap			Biaya Variabel	
Klaster	Jumlah Pendaftar	Tarif (Rp)	Keterangan	Tarif (Rp)
Klaster 1	1 - 500	30.000.000	Akademik Pilihan 1	35.000
Klaster 2	501 - 1.000	50.000.000	Akademik Pilihan 2	5.000
Klaster 3	1.001 - 5.000	75.000.000	Portofolio Pilihan 1	35.000
Klaster 4	5.001 - 10.000	150.000.000	Portofolio Pilihan 2	5.000
Klaster 5	di atas 10.000	250.000.000		

Perhitungan Alokasi Pusat UTBK



Biaya Tetap		Biaya Variabel	
Jumlah Pendaftar	Tarif (Rp)	Keterangan	Tarif (Rp)
0 - 200	3.800.000	Alokasi PC	25.000
201 - 500	5.250.000	Alokasi Peserta	85.000
501 - 1.000	79.250.000		
1.001 - 2.000	121.500.000		
2.001 - 5.000	210.200.000		
5.001 - 7.500	263.800.000		
7.501 - 15.000	309.400.000		
15.001 - 20.000	371.600.000		
20.001 - 25.000	402.700.000		
> 25.000	433.800.000		

Lembaga Pengawas

- Satuan Audit Internal
 - Irjen Kemdikbudristekdikti
 - **Badan Pemeriksa Keuangan**
- **Audit** : pendapat atau opini yang independen dari pihak ketiga tentang laporan keuangan yang akurat, lengkap, relevan, wajar, dan pastinya sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan yang berlaku.
- **Tujuan** : mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi, dan lembaga disusun melalui prinsip dan standar akuntansi yang berlaku.

Contoh Temuan BPK

- Pengelola Keuangan LTMPPT dan PTN Penerima Penugasan dalam membelanjakan anggaran tidak mengikuti pedoman standar yang berlaku;
- Pengelola keuangan LTMPPT tidak tertib dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal keuangan negara dan pengelolaan BMN;
- Penanggung jawab keuangan masing-masing PTN yang terlambat menyetorkan sisa;
- Dana kontrak penugasan LTMPPT tidak tertib dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;



LTMPT
Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi



Terima Kasih

